



Peranan Electronic Government Dalam Publikasi Monitoring Kualitas Udara Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang

Rizka Maharani ¹, Ahmad Murodi ², Machrunnisa ³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Abstrak

Received: 03 Januari 2024
Revised: 11 Januari 2024
Accepted: 18 Januari 2024

Perkembangan teknologi telah berkontribusi dalam bidang lingkungan hidup. Salah satunya upaya dalam pelestarian lingkungan hidup adalah pemantauan dan pengendalian kualitas udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan electronic government dalam publikasi monitoring kualitas udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur serta analisis dari kebijakan yang melibatkan tinjauan terhadap literatur terkait electronic government, publikasi kualitas udara, dan lingkungan hidup di Tangerang. Pada penelitian ini peranan electronic government dalam publikasi monitoring kualitas udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang menggunakan teori Yong (2003) yang berisi indikator Mudah diakses (Accessibility), Pelayanan harus selalu tersedia (Availability), Keamanan dan Kepercayaan Masyarakat (Security and Accountability), Hubungan (Integrability), Biaya (Sustainability) yang dapat memberikan sejumlah manfaat. Pertama, electronic government memungkinkan akses publik yang lebih luas terhadap informasi kualitas udara. Dengan adanya platform elektronik yang mudah diakses, masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi terkini tentang tingkat polusi udara di berbagai wilayah Kota Tangerang.

Keywords: *Electronic Government, Kualitas Udara, Monitoring, Publikasi*

(*) Corresponding Author: rizkamaharani111@gmail.com

How to Cite: Maharani, R., Murodi, A., & Machrunnisa. (2024). Peranan Electronic Government Dalam Publikasi Monitoring Kualitas Udara Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10533159>

PENDAHULUAN

Pada perkembangan teknologi disektor pemerintahan mulai berkembang pesat, baik dalam mencari informasi ataupun memberikan informasi kepada masyarakat, serta dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara efektif kapanpun dan dimanapun untuk kepentingan masyarakat. Pada perkembangan teknologi ini telah mengalami kenaikan yang signifikan baik dari teknologi maupun kebijakan dan tugas pemerintah. *Monitoring* kualitas udara menjadi salah satu aspek penting dalam sistem informasi lingkungan hidup. Dengan memantau kualitas udara, informasi tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengendalian pencemaran udara. Sistem informasi lingkungan hidup memiliki peran penting dalam mempublikasikan informasi mengenai status lingkungan hidup kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki akses informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pada sistem informasi ini sangat berpengaruh pada pelayanan publik mengenai penerapan *electronic government* dalam hal ini mengacu pada pelayanan informasi kepada masyarakat dari pemerintah secara nasional melalui media

internet atau sarana digital lainnya. *Electronic government* di Indonesia diperkenalkan pada tahun 2001 dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Telekomunikasi, Media, dan Informatika. Dalam hal ini instansi pemerintahan dapat menjalankan penerapan *electronic government* dalam upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang terencana. Tujuan dari penerapan *e-government* adalah meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sosial. *E-government* bertujuan untuk memberikan pelayanan publik mengoptimalkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Instruksi presiden No.3 Tahun 2003 memberikan tugas atau tanggung jawab setiap instansi pemerintah untuk melakukan perumusan rancangan terkait lingkungan pemerintahan atau instansi masing-masing. Implementasi *e-gov* di Indonesia didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memberikan kemudahan mengakses. Tujuan utama dari *e-government* yaitu memberikan kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaksanaan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk terciptanya pemerintahan yang transparan. Selain itu, implementasi *e-government* juga bertujuan untuk mendukung agar terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif.

Dengan demikian, pengendalian kualitas lingkungan hidup yakni menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha/kegiatan, serta pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penerapan *e-government* di Kota Tangerang mempunyai sejumlah hambatan, terutama terkait dengan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pemantauan kualitas udara. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang perlu memberikan pelayanan berbasis online yang melibatkan pengenalan terhadap perubahan layanan kepada masyarakat, khususnya terkait publikasi alat ukur pemantauan kualitas udara.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat mengenai inovasi yang telah dilakukan dalam upaya pemantauan kualitas udara. Sosialisasi dan pemahaman terhadap program dan kebijakan yang telah diimplementasikan harus terus dilakukan kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Hal ini akan membantu dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama terkait pemantauan kualitas udara di Kota Tangerang. Dengan adanya sosialisasi yang terus dilakukan, masyarakat dapat memahami sehingga pemantauan kualitas udara dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh melalui layanan berbasis *online* yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Melalui upaya ini, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Tangerang.

Monitoring udara memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi lingkungan hidup yang harus diumumkan kepada masyarakat. Pada saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah menyediakan pelaporan informasi mengenai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) melalui *website* yang ada pada portal aplikasi Tangerang Live namun masih terdapat tantangan dalam menjalankan *e-government* di Kota Tangerang terkait pengetahuan masyarakat terhadap program tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya terus-menerus dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas udara di beberapa lokasi

di Kota Tangerang. Melalui kegiatan *monitoring* ini, hasil yang diperoleh dapat menunjukkan apakah terjadi penurunan atau peningkatan kualitas udara.

Pemerintah Kota Tangerang perlu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, instansi terkait, dan masyarakat, dalam upaya menjaga lingkungan kualitas udara. Selain itu, penting juga untuk melakukan persebaran terkait informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada masyarakat mengenai hasil *monitoring* kualitas udara. Hal ini akan memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas udara di Kota Tangerang. Dengan melakukan pemantauan yang terus menerus, pemerintah Kota Tangerang akan dapat mengidentifikasi perubahan dan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan udara. Selanjutnya, langkah-langkah penanggulangan dan upaya perbaikan dapat diambil untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Pada penelitian ini permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat pada publikasi monitoring kualitas udara di Kota Tangerang. Perencanaan yang baik merupakan salah satu proses dalam pengembangan *e-government*. Dengan perencanaan yang matang, penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan dapat diarahkan dan dioptimalkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

METODE

Menurut (Haryoko et al., 2020) Pada penelitian ini memakai metode kualitatif yang umumnya pada proses penelitian dimulai dengan proses pengumpulan data yang dapat berupa observasi, wawancara, atau analisis data. Data-data ini kemudian dikategorikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola atau temuan-temuan yang muncul. Dari temuan-temuan tersebut, peneliti dapat mengembangkan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

Menurut (Manogari & Zia, 2018) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena yang diteliti dengan wawancara dengan informan yang terlibat dalam fenomena tersebut. Informasi yang diperoleh dari wawancara akan dikaji dengan seksama oleh peneliti untuk menghasilkan pernyataan yang mewakili persepsi informan terhadap fenomena yang diteliti. Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan *electronic government* dalam publikasi *monitoring* kualitas udara sudah berjalan baik baik atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi (tupoksi) yang diamanatkan kepada DLH Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai SKPD, DLH berfungsi sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah, DLH berperan dalam mengelola aspek lingkungan hidup di tingkat kota, termasuk kebijakan dan program-program terkait pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian dampak lingkungan, pelayanan publik terkait lingkungan, serta pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.

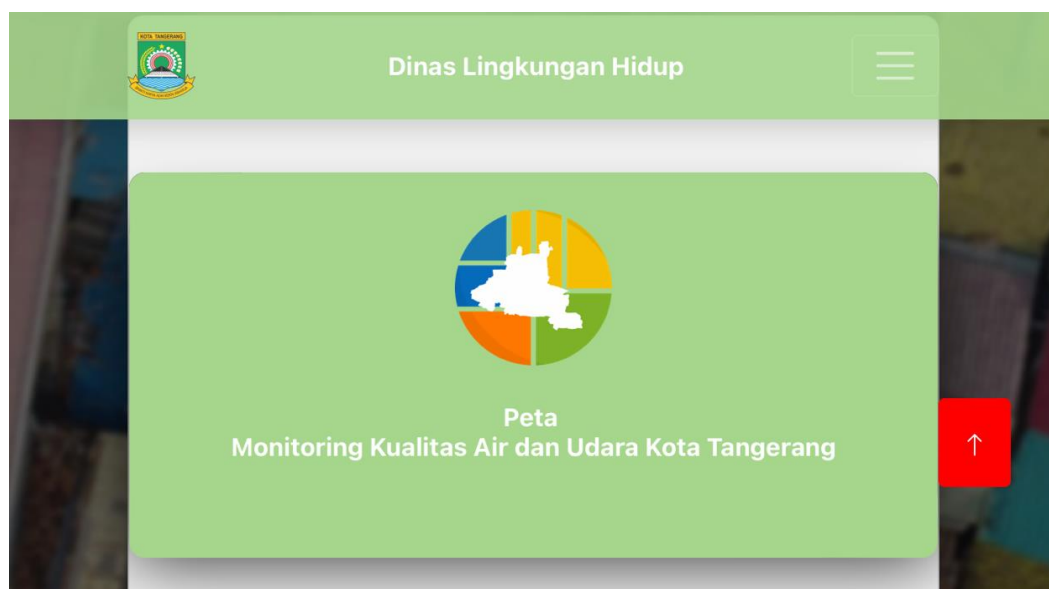
Pelaksanaan *Electronic Government* di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang

Pelaksanaan *electronic government* pada program *Monitoring* Kualitas Udara di Dinas Lingkungan Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan untuk kepentingan Industri, Kawasan Perkantoran, Transportasi Daerah dan Kawasan Pemukiman berdasarkan Indikator, yaitu :

Pemeliharaan sistem merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya TIK dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam durasi waktu siklus hidup yang seharusnya, dalam rangka mendukung operasi sistem secara optimal. Berikut hasil wawancara melalui Ibu Misbah Nurhafizah, S.Si., M.Si. selaku Sub Koordinator Pemantauan Kualitas Lingkungan mengatakan bahwa ada beberapa tahap dalam mengakses sistem *monitoring* kualitas udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang:

1. Buka Aplikasi/Website Tangerang Live.
2. Cari menu Tangerang Satu Peta,
3. Pilih simpul jaringan informasi geospasial pemerintah Kota Tangerang,
4. Pilih portal Dinas Lingkungan Hidup
5. Lalupilih peta monitoring kualitas air dan udara Kota Tangerang.
6. Setelah itu kita bisa lihat informasi terkait kualitas udara di Kota Tangerang.

Gambar 4.2



Situs Resmi Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang

Gambar diatas merupakan program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah konsentrasi NO₂ dan SO₂ selama 24 jam.

Lokasi Stasiun Pemantauan Udara di Kota Tangerang

NO	PELAYANAN TERSEDIA	HUBUNGAN KEPEMILIKAN	KETERANGAN
1	Pasir Jaya	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Untuk keperluan Tipologi Industri
2	Taman Gajah	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Untuk Kawasan Perkantoran/ Jasa
3	Benteng Betawi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang	Untuk Daerah/ Area Transportasi;
4	Sudimara Barat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang	Untuk Kawasan Permukiman

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2023

Tabel diatas sebagai informasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun melakukan pemantauan kualitas udara ambien di 4 titik lokasi pemantauan yang tersebar di wilayah Kota Tangerang.

PEMBAHASAN

1. Mudah diakses (*Accessibility*)

Penerapan *electronic government* bukan hanya sekadar implementasi teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan dalam budaya kerja, kebijakan, dan mindset dalam pemerintahan. Dengan komitmen dan dukungan yang kuat, penerapan *electronic government* dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan *electronic government* pada Program publikasi monitoring kualitas udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dimaksudkan untuk mengetahui serta mendiskripsikan keberhasilan dari penerapan *electronic government* tersebut dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan masyarakat untuk keperluan industri, perkantoran/jasa, daerah area transportasi dan kawasan permukiman untuk dalam program *electronic government* yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang guna menganalisis kendala-kendala yang ada pada lingkungan sekitar. Bagi pemerintah, *electronic government* memungkinkan pengelolaan data dan informasi yang lebih efisien, pengurangan birokrasi, dan peningkatan produktivitas. Bagi masyarakat, *electronic government* memberikan kemudahan akses terhadap berbagai layanan publik.

Pada teori mudah diakses pengembangan e-government merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat secara elektronik. Dengan sistem *electronic government* yang dikembangkan dengan baik,

pemerintah dapat memberikan akses mudah dan cepat kepada penduduk untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan publik.

Melalui platform *electronic government*, seperti situs web pemerintah, portal *e-government*, atau aplikasi *mobile*, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait program pemerintah, kebijakan publik, layanan publik, persyaratan administrasi, prosedur pengajuan, dan lain sebagainya. Masyarakat dapat mengakses informasi ini kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan internet.

Dalam konteks *electronic government*, informasi yang disediakan melalui situs web atau portal *e-government* masih sulit untuk diakses oleh masyarakat. Dikarenakan interaksi antarmuka yang ramah pengguna, pencarian yang mudah, pengaturan kategori yang jelas, dan navigasi yang intuitif masih sulit untuk membantu pengguna dalam mengakses dan menemukan informasi yang mereka butuhkan dalam program *monitoring* kualitas udara di Kota Tangerang.

2. Pelayanan harus selalu tersedia (*Availability*)

Dalam konteks pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup merupakan kategori layanan yang penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat melihat ada kekurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan oleh pemerintah, mereka memiliki hak untuk menuntut peningkatan kinerja melalui berbagai jalur partisipasi, termasuk demonstrasi atau mekanisme lain yang tersedia.

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah adalah hal yang wajar, karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan melindungi lingkungan hidup. Ketika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana publik atau ketidaksesuaian dengan standar yang diharapkan, masyarakat memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan menuntut perbaikan melalui berbagai mekanisme yang ada.

Secara keseluruhan, dalam pelaksanaan pengelolaan *electronic government* di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang penting sudah baik dalam indikator pelayanan harus tersedia terkait pelayanan public yang melibatkan pemangku kepentingan masyarakat dan memastikan aksesibilitas informasi yang mudah bagi masyarakat.

3. Keamanan dan Kepercayaan Masyarakat (*Security and Accountability*)

Penting untuk mencatat bahwa pengembangan *electronic government* juga perlu memperhatikan aspek keamanan dan privasi data. Perlindungan data pribadi masyarakat harus dijaga dengan baik, dan tindakan keamanan cyber harus diimplementasikan untuk menghindari risiko kebocoran informasi dan serangan cyber.

Keamanan informasi sangat penting dalam konteks *electronic government*. Dalam mengelola informasi lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang harus menjaga keamanan data agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Terdapat berbagai potensi ancaman terhadap keamanan informasi yang dapat mengganggu dan merusak layanan *electronic government*.

Selain itu, berbagi informasi antar lembaga harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan memastikan bahwa sumber informasi yang digunakan adalah sah.

Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran penggunaan informasi yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya.

Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang memiliki tanggung jawab sebagai pemelihara dan pengelola informasi pribadi yang dipercayakan oleh masyarakat. Program situs web dan layanan yang digunakan dalam *e-government* ini sudah menyediakan perlindungan yang memadai untuk menghindari risiko kebocoran informasi. Hal ini mencakup praktik perlindungan data dan privasi yang baik, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, dan sistem keamanan yang handal.

4. Hubungan (*Integrability*)

Electronic government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya meliputi :

1. *Government to Citizen (G2C)*

salah satu tipe hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam konteks e-government. Tujuan utama dari G2C adalah memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkait pemerintahan.

2. *Government to Business (G2B)*

G2B mengacu pada hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi dan mempermudah kegiatan bisnis masyarakat, terutama kalangan pebisnis, dengan pemerintah.

3. *Government to Government (G2G)*

G2G mengacu pada hubungan antara pemerintah dengan pemerintah lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi, dan kerjasama antara pemerintah-pemerintah yang terlibat.

4. *Government to Employees (G2E)*

G2E merujuk pada hubungan antara pemerintah dengan para pegawai atau karyawan di dalam organisasi pemerintahan. Hubungan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kesejahteraan pegawai dalam lingkungan kerja pemerintahan.

Berikut adalah hubungan pada pelaksanaan program *monitoring* kualitas udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang :

1) Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)

Dengan adanya koordinasi dan kerjasama antara DLH dan BRIN dalam penerapan program *monitoring* kualitas udara, diharapkan pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk kualitas udara.

Penting untuk terus memantau perkembangan dan implementasi perubahan tersebut, serta memastikan bahwa kerja sama antara DLH dan BRIN dalam penerapan program *monitoring* kualitas udara dapat berjalan dengan baik demi menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Taman Gajah serta memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan adanya penggabungan ini, diharapkan terjadi sinergi yang lebih baik dalam perlindungan lingkungan

hidup, pengelolaan kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas dan fungsi dalam mengembangkan kebijakan, merumuskan strategi, dan melaksanakan program di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Beberapa bidang kerja yang menjadi fokus KLHK antara lain pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam menyusun kebijakan, merumuskan regulasi, melakukan pemantauan, dan melaksanakan program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan. Kerja sama dan koordinasi antara KLHK dengan instansi dan lembaga terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, BRIN, dan pihak-pihak lain, penting untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pemantauan kualitas udara yang efektif.

Dalam meningkatnya kualitas lingkungan hidup IKLH dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai alat untuk mengukur dan memantau tingkat keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Nilai IKLH digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Pada penerapan program *monitoring* kualitas udara ini DLH dan KLHK mempunyai hubungan kepemilikan di lokasi pelayanan Pasir Jaya.

5. Biaya (*Sustainability*)

Penggunaan teknologi terbaru dalam proyek e-government harus dipertimbangkan secara efektif dan efisien. Efektivitas teknologi tersebut dapat diukur dari kemampuan untuk menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan teknologi juga menjadi pertimbangan penting, di mana harus ada keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan.

Perkembangan teknologi informasi yang terus berlangsung mempengaruhi kriteria kesuksesan *e-government*. Proyek *e-government* yang masih menggunakan teknologi yang sudah usang atau tidak terkini dapat mengalami keterbatasan dalam hal pengembangan, keamanan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan melakukan upgrade sistem secara berkala untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi e-government.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik ke dalam *e-government*, Sukses atau tidaknya *electronic government* pada program *monitoring* kualitas udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang bisa dilihat dari kebaruan teknologi yang dimiliki. Pada indikator biaya pada program ini terdapat komponen biaya untuk Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pada pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dan untuk biaya pemeliharaan peralatan mesin, dan lainnya. Definisi *e-government* ini bertujuan sebagai keterbukaan, akuntabilitas, serta transparansi maka indikator kesuksesan *e-government* sudah ada peningkatan.

Hambatan dalam penerapan *monitoring* Kualitas Udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang

Kendala yang disebutkan yaitu mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *website* dalam aplikasi *e-government* di Kota Tangerang maka disebutkan dari hasil penelitian ini tidak ada sosialisasi terkait adanya program *monitoring* kualitas udara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sehingga tanggapan masyarakat terkait program ini masih sulit untuk diakses.

Untuk mengatasi kendala tersebut, penting untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan *e-government*. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dapat melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih intensif dan terarah, dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang manfaat dan cara menggunakan *website* atau aplikasi *e-government*. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan, workshop, seminar, atau kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan pengetahuan masyarakat terkait *e-government*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti memaparkan kesimpulan terkait Peranan *Electronic Government* dalam Publikasi *Monitoring* Kualitas Udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Dalam penerapan pada program *electronic government* pada publikasi *monitoring* kualitas udara yang dikeluarkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang ini sudah berbasis elektronik. Dalam penerapan *electronic government* ini partisipasi masyarakat Kota Tangerang masih kurang baik, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu dan paham tentang publikasi.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *electronic government* di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang yaitu kurangnya sosialisasi yang *intens* mengenai pemanfaatan *e-government* secara khusus dalam program *monitoring* kualitas udara. Memahami bahwa sikap masyarakat yang apatis dan kurang terbuka terhadap perubahan teknologi informasi dan komunikasi merupakan kendala yang signifikan dalam penerapan *e-government*. Dalam konteks ini, sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang harus lebih spesifik dan fokus dalam memperkenalkan serta memberikan edukasi tentang penggunaan *electronic government*, mengingat tujuan *electronic government* yang diterapkan agar tercapainya *good government*.

DAFTAR PUSTAKA

- Annkurn. (2020). *No Title*. Publikasi.
- Aprilia, F. T., Taqwa, A., & Handayani, A. S. (2021). Perancangan Sistem Monitoring Kadar Kualitas Udara Menggunakan Particulate Matter 2,5
- Darmawan Napitupulu, Muhammad Ridwan Lubis, E. R., Surya Hendra Putra, Desi Endah Pratiwi dan Doddy Wihard. (2018). *Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Karawang Melalui Instagram*.8.
- Dewi, W. C., Raharjo, M., & Wahyuningsih, N. E. (2021). Literatur Review : Hubungan Antara Kualitas Udara Ruang Dengan Gangguan Kesehatan Pada Pekerja. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1). <https://doi.org/10.31602/ann.v8i1.4815>

- Harminingtyas. (n.d.). *Analisis Layanan Website Sebagai Media Promosi, Media Transaksi Dan Media Informasi Dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image Perusahaan Pada Hotel Ciputra Di Kota Semarang.*
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis).*
- Hikmawati. (2017). *Metodologi Penelitian.*
- Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021). Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif “Epistemologi Islam.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 870–880. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.358>
- Kadir, A. I. N. K., Driejana, D., & Santoso, M. (2020). Komposisi Kimia Pencemar Partikulat Kasar dan Halus di DKI Jakarta Pada Musim Hujan dan Mangrove Pandansari. *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 17(2), 225. <https://doi.org/10.32509/wacana.v17i2.650>
- Manogari, R. R., & Zia, U. K. (2018). Strategi Marketing Public Relations Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes Dalam Mempromosikan Objek Wisata
- Marlynda Happy Nurmalita Sari, S. B. (2020). *Pelayanan Publik. Nitrogen dioksida.* (2022). 28 Desember 2022.
- Mazlan. (2010). *Penerapan Electronic Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.* 9, 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Mubassiran. (2020). *Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika. Ilmiah Manajemen Informatika*, 12(2), 1–70.
- Musim Kemarau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(3), 522–530. <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.522-530>
- Pemerintahan, M. (2022). *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Desa Lamajang Kecamatan Pengolah Data Kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalenga.* 6(November).
- Pengembangan, M., Administrasi, P., Dinas, D. I., Dan, K., & Kabupaten, I. (2019). *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA). XVI(2)*, 163–178.
- Pradifan, A., Widayat, W., & Suprihanto, A. (2021). Pemantauan Kualitas Udara Kota Tegal (Studi Kasus : Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Timur). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(1). <https://doi.org/10.14710/jil.19.1.73-82>
- Richardus Eko Indrajit. (2016). Electronic government. In *Wirtschaftsinformatik*. <https://doi.org/10.1007/BF03251472>
- Risnandar. (2014). Analisis E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 2(7), 192–199.
- Shidki, H., Chandra, I., Djunaedy, E., Elektro, F. T., & Telkom, U. (2020). *Terbuka Di Universitas Telkom Indoor Air Quality Analysis Of Open Offices In Telkom.* 7(1), 1121–1128.
- Subagiyo, H., Wahyuni, R. T., Akbar, M., & Ulfa, F. (2020). *Rancang Bangun Sensor Node untuk Pemantauan Parameter Kualitas Udara.* 18(1), 72–79.
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian dan Pengembangan.*

- Sundaro, H. (2022). Positivisme dan Post Positivisme: Refeksi atas Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Perencanaan. *Modul*, 22(1), 21–30.
- Swastika, W., Nur, A. W., & Kelana, O. H. (2019). Monitoring Ruangn Untuk Deteksi Manusia Berbasis CNN Dengan Fitur Push Notification. *Teknika*, 8(2), 92–96. <https://doi.org/10.34148/teknika.v8i2.166>
- Syifa Saputra, J., & Edi Surya Negara, J. S. (2020). *E-Government : Implementasi, Strategi dan Inovasi*.
- Wantania, C. (2019). Analisis Udara Ambien Dengan Parameter Pm10. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog)*, 2.
- Yunita, R. D., & Kiswandono, A. A. (2017). Kajian Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Sulfur Dioksida (SO₂) Sebagai Polutan Udara Pada Tiga Lokasi Di Kota Bandar Lampung. *Analytical and Environmental Chemistry*, 2(01), 1–11.